



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

**KECAMATAN TAPIN UTARA
KABUPATEN TAPIN**



Alamat : Jalan SPG Nomor 76,
Rangda Malingkung, Kabupaten
Tapin, Kalimantan Selatan 71111



☎ (0517) 31375

🌐 tapinutara.profile.tapinkab.go.id

✉ kec.taput@gmail.com



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Kecamatan Tapin Utara tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kanau, 31 Maret 2026

Kecamatan Tapin Utara



IVANDA CHANDRA SARI, S.STP, M.M
NIP. 198602062004122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.2 Efisiensi Anggaran	116
 BAB IV PENUTUP	 127
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	5
Tabel 2. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025	16
Tabel 2.4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025	18
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja	33
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	35
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain Tahun 2025	36
Tabel 3.7	Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	39
Tabel 3.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	50
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja	51
Tabel 3.10	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	53
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain Tahun 2025	54
Tabel 3.12	Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	57
Tabel 3.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	66
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja	67
Tabel 3.15	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	69
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain	70

	Tahun 2025	
Tabel 3.17	Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	73
Tabel 3.18	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	76
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja	78
Tabel 3.20	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	80
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain Tahun 2025	82
Tabel 3.22	Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	85
Tabel 3.23	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	88
Tabel 3.24	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Tapin Utara	91
Tabel 3.25	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	91
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Kinerja	93
Tabel 3.27	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	95
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain Tahun 2025	96
Tabel 3.29	Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	99
Tabel 3.30	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	104
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian Kinerja	106
Tabel 3.32	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	108
Tabel 3.33	Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain Tahun 2025	109
Tabel 3.34	Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	112
Tabel 3.35	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Utara	5
Gambar 3.1	Ruang Pelayanan Kecamatan	48
Gambar 3.2	Pengisian Kuesioner Kepuasan Layanan Masyarakat	49
Gambar 3.3	Pembangunan di Desa	62
Gambar 3.4	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan Masyarakat	63
Gambar 3.5	Fasilitasi Bantuan Sosial ke Masyarakat	64
Gambar 3.6	Fasilitasi Pembinaan BUMDES	64
Gambar 3.7	Fasilitasi Pembinaan KOPERASI DESA	65
Gambar 3.8	Fasilitasi Pelayanan Permohonan Rekomendasi	65
Gambar 3.9	Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam	75
Gambar 3.10	Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	76
Gambar 3.11	Fasilitasi Permohonan Pelayanan Rekomendasi	87
Gambar 3.12	Evaluasi Laporan APBDes	87
Gambar 3.13	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	103
Gambar 3.14	Asistensi Pengutan Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	103
Gambar 3.15	Pelaksanaan Peningkatan Displin Apel di Kecamatan Tapin Utara	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025	34
Grafik 3.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025	52
Grafik 3.3	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025	68
Grafik 3.4	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025	79
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2025	94
Grafik 3.6	Capaian Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2025	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Tapin Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Tapin Utara:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

Kecamatan Tapin Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Tapin Utara mempunyai fungsi :

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan sekretariat; dan
- h. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

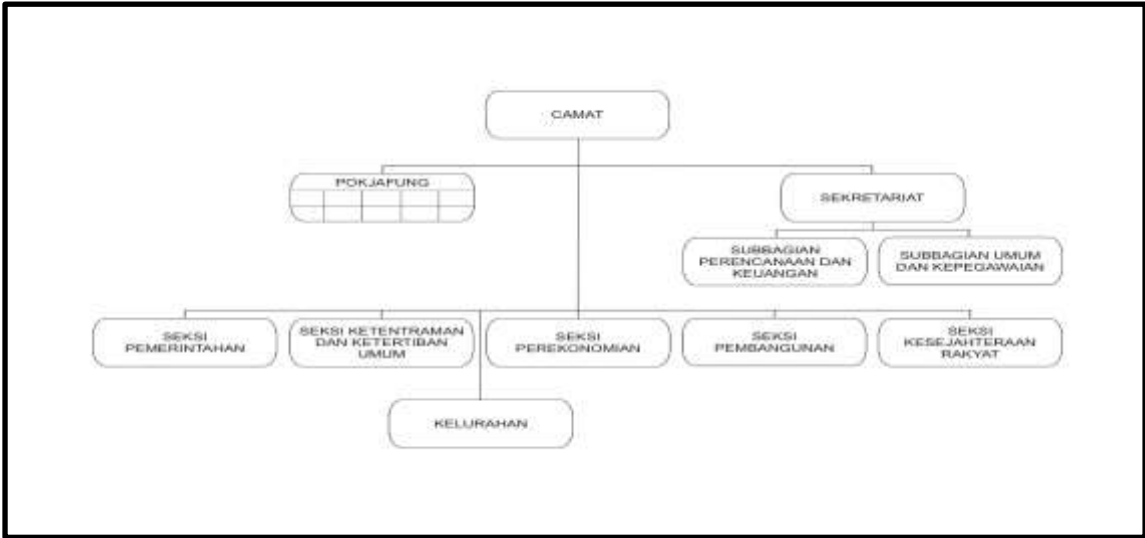
Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
- c. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;

- e. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Tapin Utara. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Tapin Utara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Utara



Sumber : Kepegawaian Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Tapin Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Tapin Utara :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024 (n-1)	Rp 10.576.662.532,-
APBD	Tahun n	Rp 10.233.022.434,-

Sumber : SIPD RI dan SIPANDA Kecamatan Tapin Utara Tahun 2024 dan 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk Kecamatan Tapin Utara dengan tipe A;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029; dan
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Kecamatan Tapin Utara adalah ***Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.*** Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tapin Utara:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (satuan: poin)	92.5	93.55	93.6	93.65	93.7
		2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (satuan: poin)	92.5	92.55	92.6	92.65	92.7
		3 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (satuan: poin)	92.5	92.55	92.6	92.65	92.7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80	81	81.05	81.1	81.15
		5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	80	81	81.05	81.1	81.15
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (satuan: poin)					

Sumber : Renstra Kecamatan Tapin Utara Periode 2025 – 2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan	Poin	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan adalah peningkatan persepsi positif warga terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan indikator seperti kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan kepastian biaya. Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	1 Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Poin	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Poin	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh kecamatan untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman di lingkungan masyarakat melalui layanan pengawasan, pencegahan konflik, penegakan peraturan daerah, serta kolaborasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	3 Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Poin	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat pertanggungjawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang didasarkan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian hasil sesuai dengan perencanaan kinerja, yang diukur melalui dokumen laporan kinerja, audit internal/eksternal, dan kepatuhan terhadap indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bobot Maksimal Komponen yang dinilai : - Perencanaan Kinerja=30, Pengukuran Kinerja=30, Pelaporan Kinerja=15 dan Evaluasi Internal=25	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	5 Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	Meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah adalah peningkatan kemampuan, integritas, kedisiplinan, dan etos kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kompetensi jabatan, kode etik profesi, serta nilai dasar ASN (berAKHLAK), yang diukur melalui kinerja individu, kepatuhan terhadap aturan, hasil evaluasi kompetensi, dan tingkat pelatihan yang diikuti. Berdasarkan Permen PAN &RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Nilai IP-ASN (Sekcam)

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan (satuan: poin)	92.5
1-1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (satuan: poin)	92.5
1-2	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (satuan: poin)	92.5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1-3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (satuan: poin)	92.5
1-4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (satuan: score)	80
1-5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (satuan: poin)	80

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Tapin Utara:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	27
		Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	20
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	21
1-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100
1-1-1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
1-1-2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
1-1-3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1
1-1-4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1
		jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1
1-1-5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10
1-2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100
		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	100
1-2-1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu bulan	49
		Jumlah Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu bulan	1
1-2-2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1-2-3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1
1-3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80
1-3-1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4
		Jumlah Kegiatan Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4
1-4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100
1-4-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12
1-4-2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1
1-4-3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1
1-4-4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12
1-4-5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12
1-4-6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12
1-4-7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1-5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80
1-5-1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22
		Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1
1-5-2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4
1-6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	100
1-6-1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
1-6-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12
1-6-3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1-7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80
1-7-1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1
1-7-2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18
		Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1
1-7-3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	92.5
2-1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	100
2-1-1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12
		Jumlah Kegiatan Rapat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	1
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	92.5
3-1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100
		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa dengan sumber dana APBDes yang sesuai dengan RAB	100
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		masyarakat di wilayah kecamatan	
		Jumlah Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	1
		Persentase rekomendasi administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100
3-1-1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12
		Jumlah Kegiatan Rapat Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	12
3-1-2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1
3-2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	100
3-2-1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4
		Jumlah Kegiatan Rapat Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4
3-2-2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100
		Jumlah Kegiatan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3-3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase BUMDES yang berbadan Hukum	80
		Persentase KOPERASI DESA yang berbadan hukum	80
		Persentase Posyantek yang di Bina	100
3-3-1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1
3-3-2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	92.5
4-1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100
		Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100
4-1-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1
		Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	92.5
5-1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100
		Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100
5-1-1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	75

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	1
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	92.5
6-1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Pelayanan Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100
		Persentase Desa dengan Laporan APBDes yang Lengkap dan Serapan Minimal 75%	100
6-1-1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4
6-1-2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6-1-3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7
6-1-4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2
6-1-5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1
6-1-6	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1
		Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1
6-1-7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa	1

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tapin Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tapin Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Tapin Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja, ditetapkan predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Kecamatan Tapin Utara telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Kecamatan Tapin Utara dengan Bupati Tapin pada tahun 2025. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan (Satuan : poin)	92.5	91.83	99,28	Sangat Baik	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social (Satuan : poin)	92.5	93.29	100,85	Sangat Baik	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra dan Kasi Perekonomian)
3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Satuan : poin)	92.5	83.3	90,05	Tinggi	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, Kasi Trantib)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Satuan : poin)	92.5	91.67	99,10	Sangat Baik	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, Kasi Pemerintahan)
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Score)	80	80.75	100,94	Sangat Baik	LHE AKIP
6	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Satuan : poin)	80	79.7	99,63	Sangat Baik	Nilai IP-ASN (Sekcam)

Sumber : Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan / Sasaran 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Kinerja tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan melalui survei yang dilakukan per triwulan (PermenPANRB No.14 Tahun 2017)

Sumber : *Defenisi Operasiaonal Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025*

Uraian penjelasan tabel :

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Tapin Utara menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat kecamatan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja berupa nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan.

Pengukuran indikator dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh melalui pelaksanaan survei secara berkala setiap triwulan. Pelaksanaan survei ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan

adanya pengukuran yang terstandar dan dilakukan secara periodik, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tapin Utara.

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan (Satuan : Poin)	88,36	88,39	91,46	92.5	91.83	99,28

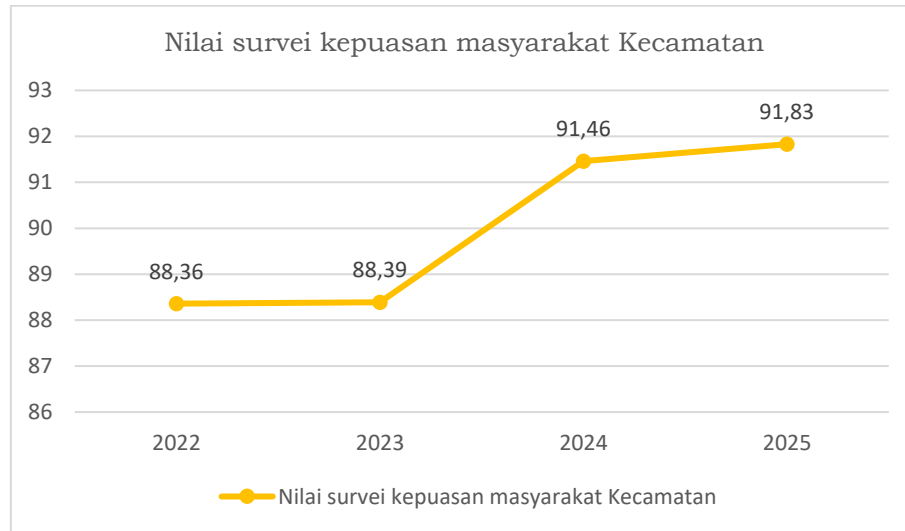
Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022-2025

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan/sasaran meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan yang diukur dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan merupakan indikator penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang baik. Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tapin Utara mengalami peningkatan selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Hal ini dikarenakan Kecamatan Tapin Utara dalam pelayanan terus melakukan evaluasi dan menerima saran serta masukan dari pengguna layanan publik untuk melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat dicapai. Adapun capaian tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1

Capaian Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025



Sumber : Data Laporan SKM Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung. Ke depan, peningkatan kualitas pelayanan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus mengalami kenaikan secara konsisten. Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan (Satuan : Poin)	91.83	92.7	99,06

Sumber : Kemajuan Capaian Kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

Menurut tabel di atas Sasaran meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan yang diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan, realisasi Kinerja tahun 2025 adalah 91,83 poin dengan target Akhir Rencana Strategis berada di 92,70 poin. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis mencapai 99,06 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja kecamatan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik telah mendekati target akhir yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilakukan berjalan cukup efektif dan memberikan hasil yang signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih sebesar 0,87 poin untuk mencapai target akhir rencana strategis. Ini mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan dalam mengelola berbagai aspek terkait meningkatkan kinerja pelayanan di wilayah kecamatan Tapin Utara, juga berkomitmen untuk selalu Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan sarana prasarana, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta melakukan inovasi dalam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, kecamatan Tapin Utara dapat mencapai sasaran strategis meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan yang telah mencapai lebih dari 99,06 persen menunjukkan bahwa sasaran strategis ini berada pada kategori sangat baik, namun tetap memerlukan upaya berkelanjutan agar target akhir dapat tercapai secara maksimal.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Tapin diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Kecamatan Lain		% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) =4/5*100
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan (Satuan : Poin)	91.83	Tapin Utara	92.5	99,28
			87.87	Tapin Selatan	90	97,63
			91.43	Binuang	91	100,47

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan dan Binuang Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Pada sasaran kinerja Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan di akhir tahun 2025

ini untuk Kecamatan Tapin Utara mendapatkan nilai 91,83 Poin dengan persentase capaian 99,28 persen, sedangkan untuk Kecamatan Tapin Selatan mendapatkan nilai 87,87 Poin dengan persentase capaian 97,63 persen dan untuk Kecamatan Binuang mendapatkan nilai 91,43 Poin dengan persentase capaian kinerja 100,47 persen. Nilai berdasarkan data yang didapatkan dari hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang dilakukan menggunakan pelayanan di masing – masing Kecamatan, Untuk persamaan Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan dengan Kecamatan Binuang yang paling mencolok yaitu letak topografinya merupakan daerah dataran. Untuk Kecamatan Tapin Utara merupakan Kecamatan kota Rantau, yang menjadi ibukota dari Kabupaten Tapin. Sedangkan untuk Kecamatan Tapin Selatan daerah dataran yang berada tidak terlalu jauh dengan wilayah ibukota Kabupaten Tapin. Untuk Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Binuang adalah Kecamatan yang padat penduduk.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan, indikator kinerja berupa nilai survei kepuasan masyarakat menunjukkan capaian sebesar 99,28 persen yaitu dari target 92,5 poin dengan realisasi 91,83 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah mencapai mencapai kategori sangat baik

Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara bertahap setiap triwulan, sehingga proses monitoring dan evaluasi pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu partisipasi responden yang relatif rendah

dalam pengisian kuesioner. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu masyarakat setelah menerima layanan, persepsi bahwa pengisian survei memerlukan waktu, serta kurangnya pemahaman bahwa hasil survei dapat berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja telah optimal, diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar data survei yang diperoleh lebih representatif. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain pemanfaatan survei digital, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran petugas pelayanan dalam mendorong partisipasi responden.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	92.5	91.67	99,10	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan pembinaan, seperti pendampingan, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas aparatur	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
1-1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	0	0	Belum Optimal	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Tahun 2025	Mengevaluasi dan menambahkan anggaran untuk kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Tahun Anggaran berikutnya
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	92.5	93.29	100,85	Berhasil	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2-1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa dengan sumber dana APBDes yang sesuai dengan RAB	100	100	100	Berhasil	Menunjukkan proporsi jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan RAB dibandingkan dengan total kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam APBDes pada periode tertentu. Nilai persentase yang tinggi mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari	Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala, Melaksanakan pengawasan rutin terhadap progres kegiatan pembangunan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi di lapangan dengan RAB. Melakukan pengecekan fisik pekerjaan, Membandingkan hasil pekerjaan di lapangan dengan volume dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam RAB. Memberikan rekomendasi perbaikan, Menyusun langkah-langkah korektif

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							sisi keuangan maupun teknis.	guna meningkatkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	1	100	Berhasil	Menggambarkan sejauh mana kecamatan memberikan dukungan, baik dalam bentuk koordinasi, pendampingan, penyediaan sarana prasarana, maupun fasilitasi administrasi terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga terkait	Meningkatkan koordinasi dengan tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi masyarakat, menyusun program fasilitasi yang terencana dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memastikan dukungan sarana, prasarana, dan administrasi berjalan optimal
		Jumlah Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	1	1	100	Berhasil	Menggambarkan sejauh mana kecamatan melakukan koordinasi, verifikasi data penerima, pendampingan, serta pengawasan dalam proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran, tepat waktu,	Melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah desa/kelurahan, serta memastikan proses

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Persentase rekomendasi administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
2-2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	100	100	100	Berhasil	Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi upaya peningkatan kapasitas, partisipasi,	Mendorong peningkatan kesejahteraan, partisipasi aktif masyarakat, serta kemandirian dalam

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							serta kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang.	pembangunan di tingkat kelurahan
2-3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase BUMDES yang berbadan Hukum	80	80	100	Berhasil	BUMDes yang telah memiliki status badan hukum resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memberikan sosialisasi terkait pentingnya status badan hukum, pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan seperti AD/ART dan kelengkapan administrasi lainnya, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses pengesahan
		Persentase KOPERASI DESA yang berbadan hukum	80	80	100	Berhasil	KOPERASI DESA yang telah memiliki status badan hukum resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memberikan sosialisasi terkait pentingnya status badan hukum, pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan seperti AD/ART dan kelengkapan administrasi lainnya, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses pengesahan
		Persentase Posyantek yang di Bina	100	100	100	Berhasil	Kegiatan pembinaan meliputi pendampingan kelembagaan,	Meningkatkan intensitas pendampingan kelembagaan, memberikan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi pengembangan inovasi teknologi tepat guna, serta dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat	pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola Posyantek, serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	92.5	83.3	90,05	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
3-1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Berhasil	Proporsi jumlah kejadian yang berhasil didokumentasikan dan dilaporkan secara lengkap, akurat, serta tepat waktu dibandingkan dengan total kejadian yang terjadi.	Meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait seperti Satpol PP, kepolisian, dan unsur masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kejadian, serta memastikan setiap kejadian terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
		Persentase rekomendasi	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan					persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	92.5	83.3	90,05	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
4-1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Berhasil	Proporsi jumlah kejadian yang berhasil didokumentasikan dan dilaporkan secara lengkap, akurat, serta tepat waktu dibandingkan dengan total kejadian yang terjadi.	Meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait seperti Satpol PP, kepolisian, dan unsur masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kejadian, serta memastikan setiap kejadian terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
		Persentase rekomendasi	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan					persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	92.5	91.67	99,10	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan pembinaan, seperti pendampingan, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas aparatur	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
5-1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Pelayanan Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi dibandingkan dengan total permohonan yang diajukan	Menyusun pedoman teknis/ SOP rekomendasi pelayanan pemerintahan serta melakukan pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Desa dengan Laporan APBDes yang Lengkap dan Serapan Minimal 75%	100	100	100	Berhasil	Desa yang mampu menyusun dan menyampaikan laporan APBDes secara lengkap sesuai ketentuan, serta merealisasikan anggaran dengan tingkat serapan minimal 75% dari total anggaran yang telah ditetapkan	Kecamatan berperan aktif agar desa dapat tepat waktu dalam penyampaian laporan APBDes secara lengkap sesuai ketentuan

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Uraian penjelasan :

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Kecamatan Tapin Utara telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Meskipun sebagian besar indikator telah mencapai target, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tindak lanjut yang lebih efektif melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program/kegiatan agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

Gambar 3.1 Ruang Pelayanan Kecamatan



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.2 Pengisian Kuesioner Kepuasan Layanan Masyarakat



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

3.1.2 Sasaran 2 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial

Kinerja Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan melalui survei yang dilakukan per triwulan (PermenPANRB No.14 Tahun 2017)

Sumber : Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial merupakan prioritas utama Kecamatan Tapin Utara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengukuran pencapaian sasaran ini dilakukan melalui nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan Tapin Utara yang menilai pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial. Survei ini menjadi alat ukur penting dalam mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Sebagai acuan pengukuran, digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihitung berdasarkan survei triwulanan sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017. Pelaksanaan survei secara berkala ini memastikan evaluasi kinerja yang berkesinambungan dan memberikan data valid untuk pengambilan keputusan serta perbaikan layanan ke depan. Berikut

realisasi kinerja sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Satuan : Poin)	88,36	88,39	91,46	92.5	93.29	100,85

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022-2025

Uraian penjelasan tabel :

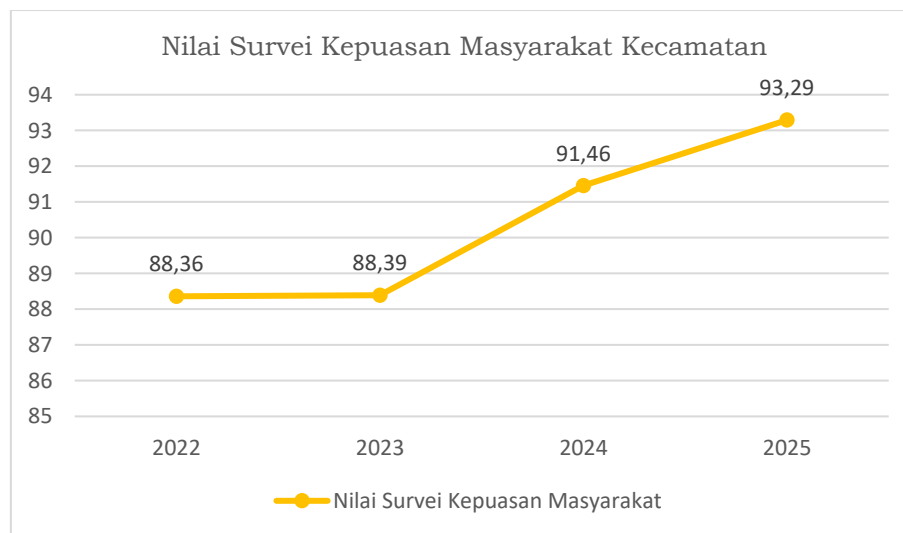
Menggambarakan Capaian kinerja pada sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial menunjukkan dinamika perkembangan selama periode tahun 2022–2025.

Pada tahun 2022, realisasi nilai survei kepuasan masyarakat tercatat sebesar 88,36 poin. Pada tahun 2023, capaian tersebut mengalami sedikit kenaikan menjadi 88,39 poin. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 91,46 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, pada tahun 2025 meskipun target yang ditetapkan mengalami peningkatan menjadi 92,50 poin, realisasi yang dicapai justru ikut meningkat menjadi 93,29 poin, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan berada jauh diatas capaian tiga tahun sebelumnya. Adapun capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial
di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025



Sumber : Data Laporan SKM Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung. Upaya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan mampu mendorong peningkatan kembali hingga melampaui target pada tahun 2025. Ke depan, peningkatan kualitas pelayanan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus mengalami kenaikan secara konsisten.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Satuan : Poin)	93.29	93.7	99,56

Sumber : Kemajuan Capaian Kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

Menurut tabel di atas Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial yang diukur dengan indikator Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, realisasi Kinerja tahun 2025 adalah 93,29 poin dengan target Akhir Rencana Strategis berada di 93,70 poin. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis mencapai 99,56 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Tapin Utara telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, meskipun masih terdapat selisih 0,41 poin yang perlu dikejar.

Tingkat kemajuan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial telah memberikan dampak

positif, namun belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Untuk meningkatkan capaian menuju target akhir Renstra, diperlukan upaya yang lebih terarah, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Tapin diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Kecamatan Lainnya		% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) =4/5*100
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Satuan : Poin)	93.29	Tapin Utara	92.5	100,85
			88.03	Tapin Selatan	90	97,81
			91.61	Binuang	91	100,67

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan dan Binuang Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Pada sasaran kinerja Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial yang diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nilai

survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di akhir tahun 2025. Kecamatan Tapin Utara menetapkan target sebesar 92,50 poin, namun realisasi yang dicapai mencapai 93,29 poin, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,85 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Tapin Utara tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi bahkan melampaui target, yang menandakan efektivitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain, Kecamatan Tapin Selatan mencatat realisasi 88,03 poin dari target 90 poin dengan capaian 97,81 persen, sedangkan Kecamatan Binuang mencapai realisasi 91,61 poin dari target 91 poin dengan capaian 100,67 persen. Dari perbandingan ini, dapat dilihat bahwa Kecamatan Tapin Utara berada pada posisi tertinggi dalam capaian relatif terhadap target, menandakan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang sangat baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Pada Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial yang diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial menunjukkan capaian sebesar 100,85 persen yaitu dari target 92,5 poin dengan realisasi 93,29 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah mencapai kategori sangat baik.

Faktor Pendukung oleh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara bertahap setiap triwulan, sehingga proses monitoring dan evaluasi pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu partisipasi responden yang relatif rendah dalam pengisian kuesioner. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu masyarakat setelah menerima layanan, persepsi bahwa pengisian survei memerlukan waktu, serta kurangnya pemahaman bahwa hasil survei dapat berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan.

Oleh karena itu, langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain pemanfaatan survei digital, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran petugas pelayanan dalam mendorong partisipasi responden.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.12 Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	92.5	93.29	100,85	Berhasil	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
2-1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa dengan sumber dana APBDes yang sesuai dengan RAB	100	100	100	Berhasil	Menunjukkan proporsi jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan RAB dibandingkan dengan total kegiatan pembangunan yang	Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala, Melaksanakan pengawasan rutin terhadap progres kegiatan pembangunan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi di lapangan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							direncanakan dalam APBDes pada periode tertentu. Nilai persentase yang tinggi mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi keuangan maupun teknis.	dengan RAB. Melakukan pengecekan fisik pekerjaan, Membandingkan hasil pekerjaan di lapangan dengan volume dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam RAB. Memberikan rekomendasi perbaikan, Menyusun langkah-langkah korektif guna meningkatkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	1	100	Berhasil	Menggambarkan sejauh mana kecamatan memberikan dukungan, baik dalam bentuk koordinasi, pendampingan, penyediaan sarana prasarana, maupun fasilitasi administrasi terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga terkait	Meningkatkan koordinasi dengan tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi masyarakat, menyusun program fasilitasi yang terencana dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memastikan dukungan sarana, prasarana, dan administrasi berjalan optimal

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	1	1	100	Berhasil	Menggambarkan sejauh mana kecamatan melakukan koordinasi, verifikasi data penerima, pendampingan, serta pengawasan dalam proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah desa/kelurahan, serta memastikan proses penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Persentase rekomendasi administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
2-2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							rekomendasi oleh pihak kecamatan	operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	100	100	100	Berhasil	Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi upaya peningkatan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang.	Mendorong peningkatan kesejahteraan, partisipasi aktif masyarakat, serta kemandirian dalam pembangunan di tingkat kelurahan
2-3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase BUMDES yang berbadan Hukum	80	80	100	Berhasil	BUMDes yang telah memiliki status badan hukum resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memberikan sosialisasi terkait pentingnya status badan hukum, pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan seperti AD/ART dan kelengkapan administrasi lainnya, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses pengesahan
		Persentase KOPERASI DESA yang berbadan hukum	80	80	100	Berhasil	KOPERASI DESA yang telah memiliki status badan hukum resmi sesuai dengan ketentuan	Memberikan sosialisasi terkait pentingnya status badan hukum, pendampingan dalam penyusunan dokumen

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							peraturan perundang-undangan	persyaratan seperti AD/ART dan kelengkapan administrasi lainnya, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses pengesahan
		Persentase Posyantek yang di Bina	100	100	100	Berhasil	Kegiatan pembinaan meliputi pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi pengembangan inovasi teknologi tepat guna, serta dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat	Meningkatkan intensitas pendampingan kelembagaan, memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola Posyantek, serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Kecamatan Tapin Utara telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Meskipun sebagian besar indikator telah mencapai target, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tindak lanjut yang lebih efektif melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program/kegiatan agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

Gambar 3.3 Pembangunan di Desa



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.4 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.5 Fasilitasi Bantuan Sosial ke Masyarakat



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.6 Fasilitasi Pembinaan BUMDES



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.7 Fasilitasi Pembinaan KOPERASI DESA



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.8 Fasilitasi Pelayanan Permohonan Rekomendasi



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

3.1.3 Sasaran 3 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Kinerja Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Satuan : poin)	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan melalui survei yang dilakukan per triwulan (PermenPANRB No.14 Tahun 2017)

Sumber : Defenisi Operasiaonal Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan prioritas utama Kecamatan Tapin Utara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengukuran pencapaian sasaran ini dilakukan melalui nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan Tapin Utara yang menilai pelaksanaan program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Survei ini menjadi alat ukur penting dalam mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Sebagai acuan pengukuran, digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihitung berdasarkan survei triwulanan sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017. Pelaksanaan survei secara berkala ini memastikan evaluasi kinerja yang berkesinambungan dan memberikan data valid untuk pengambilan keputusan serta perbaikan layanan ke depan.

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Satuan : poin)	88,36	88,39	91,46	92.5	83.30	90,05

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022-2025

Uraian penjelasan tabel :

Menggambarkan Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan dinamika perkembangan selama periode tahun 2022 – 2025.

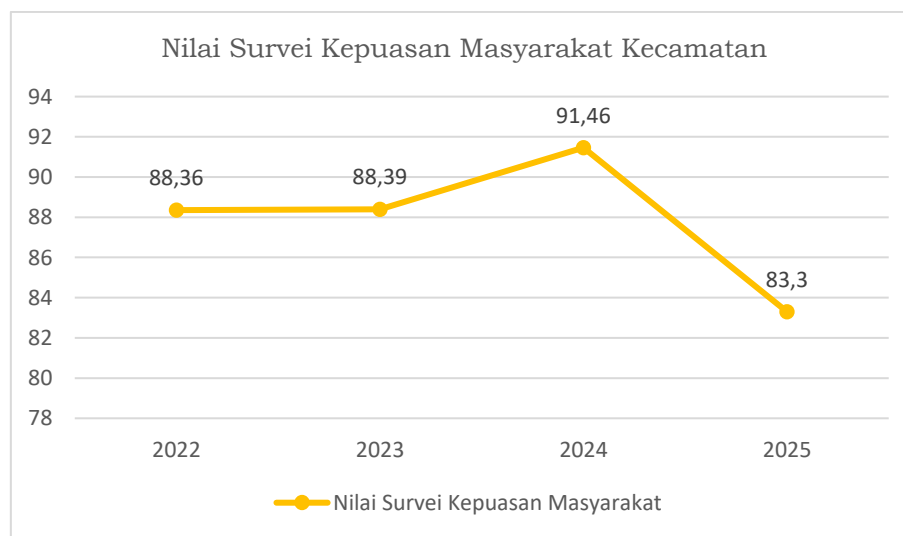
Pada tahun 2022, realisasi nilai survei kepuasan masyarakat tercatat sebesar 88,36 poin. Pada tahun 2023, capaian tersebut mengalami sedikit kenaikan menjadi 88,39 poin. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 91,46 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Sedangkan, pada tahun 2025 meskipun target yang ditetapkan mengalami peningkatan menjadi 92,50 poin, realisasi yang dicapai justru realisasi yang dicapai justru mengalami penurunan signifikan

menjadi 83,30 poin, dengan tingkat capaian kinerja hanya sebesar 90,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan berada di bawah capaian tiga tahun sebelumnya. Adapun capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025



Sumber : Data Laporan SKM Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025

Secara tren, capaian kinerja pada periode 2022 – 2024 relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, namun terjadi penurunan pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa adanya kendala dalam pelaksanaan program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, baik dari aspek kualitas layanan, efektivitas program, maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dirasakan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat, ketepatan sasaran program, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan. Selain itu, penguatan

koordinasi dengan pihak terkait serta inovasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kembali tingkat kepuasan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Satuan : poin)	83,30	92,7	89,86

Sumber : Kemajuan Capaian Kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

Menurut tabel di atas Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, realisasi Kinerja tahun 2025 adalah 83,30 poin dengan target Akhir Rencana Strategis berada di 92,70 poin. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis mencapai 89,86 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Tapin Utara telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, meskipun masih terdapat selisih 9,40 poin yang perlu dioptimalkan. Tingkat kemajuan tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di Kecamatan Tapin Utara telah berjalan cukup efektif dan memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pada beberapa aspek, seperti responsivitas penanganan gangguan ketertiban, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk mencapai target akhir Rencana Strategis, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program, penguatan peran aparatur kecamatan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap tingkat kepuasan masyarakat juga perlu dilakukan sebagai dasar perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2025 dengan dengan kecamatan lainnya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Kecamatan Lainnya		% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) =4/5*100
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Satuan : poin)	83.30	Tapin Utara	92.5	90,05
			87.71	Tapin Selatan	90	97,46
			91.48	Binuang	91	100,53

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan dan Binuang Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Pada sasaran kinerja Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di

akhir tahun 2025 ini untuk Kecamatan Tapin Utara mendapatkan nilai 83,30 Poin dengan persentase capaian 90,05 persen, Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah mendekati target, tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan agar target dapat terpenuhi sepenuhnya. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain, untuk Kecamatan Tapin Selatan mendapatkan nilai 87,81 Poin dengan persentase capaian 97,46 persen dan untuk Kecamatan Binuang mendapatkan nilai 91,48 Poin dengan persentase capaian kinerja 100,53 persen.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tapin Utara berada pada posisi di bawah Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang dalam indikator ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tapin Utara masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih kompetitif.

Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kinerja melalui perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan efektivitas program pemberdayaan, serta penguatan partisipasi masyarakat. Selain itu, *benchmarking* terhadap kecamatan dengan capaian lebih tinggi juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat diadopsi guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Pada Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial yang diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial menunjukkan capaian sebesar 90,05 persen yaitu dari target 92,5 poin dengan realisasi 83,30 poin. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah mencapai mencapai kategori tinggi.

Faktor Pendukung oleh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara bertahap setiap triwulan, sehingga proses monitoring dan evaluasi pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu partisipasi responden yang relatif rendah dalam pengisian kuesioner. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu masyarakat setelah menerima layanan, persepsi bahwa pengisian survei memerlukan waktu, serta kurangnya pemahaman bahwa hasil survei dapat berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja belum optimal, masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar data survei yang diperoleh lebih representatif. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain pemanfaatan survei digital, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran petugas pelayanan dalam mendorong partisipasi responden.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.17 Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	92.5	83.3	90,05	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
3-1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Berhasil	Proporsi jumlah kejadian yang berhasil didokumentasikan dan dilaporkan secara lengkap, akurat, serta tepat waktu dibandingkan dengan total kejadian yang terjadi.	Meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait seperti Satpol PP, kepolisian, dan unsur masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kejadian, serta memastikan setiap kejadian terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
		Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	92.5	83.3	90,05	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
4-1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	Berhasil	Proporsi jumlah kejadian yang berhasil didokumentasikan dan dilaporkan secara lengkap, akurat, serta tepat waktu dibandingkan dengan total kejadian yang terjadi.	Meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait seperti Satpol PP, kepolisian, dan unsur masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kejadian, serta memastikan setiap kejadian terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
		Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak untuk diberikan rekomendasi oleh pihak kecamatan	Penyempurnaan dan sosialisasi persyaratan pelayanan agar lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Kecamatan Tapin Utara telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Meskipun sebagian besar indikator telah mencapai target, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tindak lanjut yang lebih efektif melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program/kegiatan agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

Gambar 3.9 Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.10 Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

3.1.4 Sasaran 4 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kinerja Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan melalui survei yang dilakukan per triwulan (PermenPANRB No.14 Tahun 2017)

Sumber : Defenisi Operasiaonal Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa merupakan

prioritas utama Kecamatan Tapin Utara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengukuran pencapaian sasaran ini dilakukan melalui nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan Tapin Utara yang menilai pelaksanaan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik serta program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Survei ini menjadi alat ukur penting dalam mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Sebagai acuan pengukuran, digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihitung berdasarkan survei triwulanan sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017. Pelaksanaan survei secara berkala ini memastikan evaluasi kinerja yang berkesinambungan dan memberikan data valid untuk pengambilan keputusan serta perbaikan layanan ke depan.

Berikut realisasi kinerja sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja

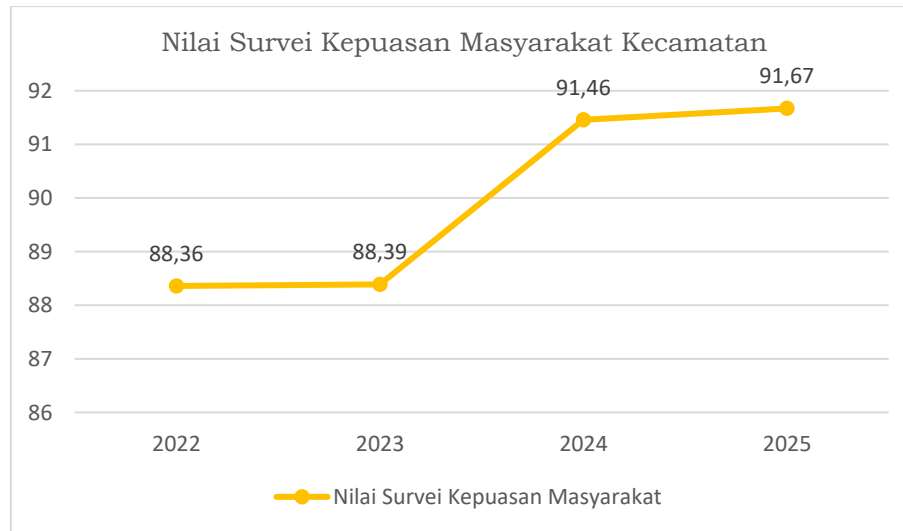
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah an desa (Satuan : Poin)	88,36	88,39	91,46	92.5	91.67	99,10

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022-2025

Uraian penjelasan tabel :

Menggambarkan Perbandingan capaian kinerja pada sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diukur melalui indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022, realisasi nilai survei kepuasan masyarakat tercatat sebesar 88,36 poin. Pada tahun 2023, capaian tersebut mengalami sedikit kenaikan menjadi 88,39 poin. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 91,46 poin. Pada tahun 2025, ditetapkan target nilai kepuasan masyarakat sebesar 92,5 poin. Realisasi yang dicapai sebesar 91,67 poin, sehingga capaian kinerja mencapai 99,10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik belum optimal mencapai target yang ditetapkan. Adapun capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
di Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025



Sumber : Data Laporan SKM Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung. Ke depan, peningkatan kualitas pelayanan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus mengalami kenaikan secara konsisten.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.20 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Satuan : Poin)	91.67	92.7	98,89

Sumber : Kemajuan Capaian Kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

Menurut tabel di atas sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diukur melalui indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, realisasi Kinerja tahun 2025 adalah 91,67 poin dengan target Akhir Rencana Strategis berada di 92,70 poin. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis mencapai 98,89 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja kecamatan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah mendekati target akhir yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilakukan berjalan efektif dan memberikan hasil yang signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih sebesar 1,03 poin untuk mencapai target akhir rencana strategis. Ini mencerminkan

efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan dalam mengelola berbagai aspek terkait meningkatkan kinerja pelayanan di wilayah kecamatan Tapin Utara, juga berkomitmen untuk selalu Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan sarana prasarana, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta melakukan inovasi dalam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, kecamatan Tapin Utara dapat mencapai sasaran strategis meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang lebih berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan yang telah dicapai menunjukkan bahwa sasaran strategis ini berada pada kategori sangat baik, namun tetap memerlukan upaya berkelanjutan agar target akhir dapat tercapai secara maksimal.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Tapin diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Kecamatan Lainnya		% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) =4/5*100
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Satuan : Poin)	91,67	Tapin Utara	92.5	99,10
			87.69	Tapin Selatan	90	97,43
			91.3	Binuang	91	100,33

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan dan Binuang Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Pada sasaran kinerja Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diukur melalui indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di akhir tahun 2025 ini untuk Kecamatan Tapin Utara mendapatkan nilai 91,67 Poin dengan persentase capaian 99,10 persen, capaian Kecamatan Tapin Utara tergolong sangat kompetitif dibandingkan Kecamatan lainnya. Untuk Kecamatan Tapin Selatan mendapatkan nilai 87,69 Poin dengan persentase capaian 97,43 persen dan untuk Kecamatan Binuang mendapatkan nilai 91, 30 Poin dengan persentase capaian kinerja 100,33 persen. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tapin Utara berada pada kategori kinerja sangat baik serta lebih baik dibandingkan kecamatan yang belum mencapai target.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, responsivitas aparatur, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan telah berjalan secara efektif. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian di masa mendatang untuk mendukung kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Pada sasaran kinerja Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diukur melalui indikator nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa menunjukkan capaian sebesar 99,10 persen yaitu dari target 92,5 poin dengan realisasi 91,67 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah mencapai kategori tinggi.

Faktor Pendukung oleh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara bertahap setiap triwulan, sehingga proses monitoring dan evaluasi pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu partisipasi responden yang relatif rendah dalam pengisian kuesioner. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu masyarakat setelah menerima layanan, persepsi bahwa pengisian survei memerlukan waktu, serta kurangnya pemahaman bahwa hasil survei dapat berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja belum optimal, masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar data survei yang diperoleh lebih representatif. Oleh

karena itu, langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain pemanfaatan survei digital, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran petugas pelayanan dalam mendorong partisipasi responden.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.22 Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	92.5	91.67	99,10	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan pembinaan, seperti pendampingan, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas aparatur	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
1-1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	0	0	Belum Optimal	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Tahun 2025	Mengevaluasi dan menambahkan anggaran untuk kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Tahun Anggaran berikutnya
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	92.5	91.67	99,10	Belum Optimal	Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan pembinaan, seperti pendampingan, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas aparatur	Mengidentifikasi aspek yang masih kurang berdasarkan hasil survei untuk segera diperbaiki
5-1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Rekomendasi Pelayanan Pemerintahan yang	100	100	100	Berhasil	Permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sehingga	Menyusun pedoman teknis/ SOP rekomendasi pelayanan pemerintahan serta melakukan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	memenuhi syarat untuk diterbitkan					layak untuk diberikan rekomendasi dibandingkan dengan total permohonan yang diajukan	pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala
		Persentase Desa dengan Laporan APBDes yang Lengkap dan Serapan Minimal 75%	100	100	100	Berhasil	Desa yang mampu menyusun dan menyampaikan laporan APBDes secara lengkap sesuai ketentuan, serta merealisasikan anggaran dengan tingkat serapan minimal 75% dari total anggaran yang telah ditetapkan	Kecamatan berperan aktif agar desa dapat tepat waktu dalam penyampaian laporan APBDes secara lengkap sesuai ketentuan

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Kecamatan Tapin Utara telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan.

Gambar 3.11 Fasilitasi Permohonan Pelayanan Rekomendasi



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.12 Evaluasi Laporan APBDes



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

3.1.5 Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.23 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diukur berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : *Defenisi Operasiaonal Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025*

Uraian penjelasan tabel :

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah di Kabupaten Tapin, memiliki kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, sasaran ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan efektif.

Tujuan memilih sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Meningkatkan transparansi: Meningkatkan transparansi kinerja perangkat daerah dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan efisiensi: Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya yang tidak perlu dalam pengelolaan pemerintahan.
4. Meningkatkan efektivitas: Meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dengan menunjukkan kinerja yang baik dan transparan.

Dengan demikian, sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat membantu meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Nilai SAKIP digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menggunakan Nilai SAKIP, perangkat daerah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja mereka, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (OPD) dihitung berdasarkan integrasi dari beberapa dokumen, dengan bobot tertentu. Secara umum, formulasi perhitungan nilai SAKIP SKPD berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (30%)

Penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja instansi pemerintah, termasuk kesesuaian rencana dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja (30%)

Penilaian terhadap kualitas pengukuran kinerja instansi pemerintah, termasuk ketepatan indikator kinerja dan ketersediaan data yang akurat.

3. Pelaporan Kinerja (15%)

Penilaian terhadap kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah, termasuk ketepatan waktu dan isi laporan.

4. Evaluasi Internal (25%)

Penilaian terhadap kualitas evaluasi kinerja internal instansi pemerintah, termasuk kesesuaian evaluasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian SAKIP OPD dilakukan oleh Inspektorat. Predikat penilaian SAKIP biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti AA (90-100), A (80-90), BB (70-80), dan B (60-70).

Capaian indikator kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Utara untuk Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024 yang dilakukan penilaian di Tahun 2025 dengan realisasi score yang diperoleh sebesar 80,75 skor dari nilai SAKIP yang ditargetkan sebesar 80,00 score. Artinya capaian kinerja atas nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Utara yang dinilai pada Tahun 2025 sebesar 100,94 persen dan optimal dalam mencapai target yang telah dijanjikan. Adapun komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.24 Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Tapin Utara

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	80.75
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber : LHE AKIP Kecamatan Tapin Utara tahun 2025

Dalam pelaksanaan peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Utara terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka penerapan dan penguatan SAKIP Perangkat Daerah. Namun, dalam hal tersebut Kecamatan Tapin Utara juga mendapatkan rekomendasi/catatan atas kualitas implelementasi SAKIP. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut meliputi :

Tabel 3.25 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
1	Perencanaan Kinerja : 1. Menurunkan indikator pengukuran dan evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sekretaris ke level bawahnya.	Perencanaan Kinerja : 1. Kecamatan Tapin Utara telah melakukan review terhadap dokumen perencanaan (Renstra, PK dan IKU) serta Menyusun cascading kinerja dari sekretaris kecamatan ke kasubag perencanaan dan keuangan dan kasubag umum kepegawaian dengan menetapkan indikator turunan yang selaras seperti : • Sekretaris : Sasaran Meningkatnya capaian SAKIP dengan indikator Nilai Komponen AKIP dan sasaran Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan dengan indikator Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti • Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang dan sasaran Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti dan Persentase laporan hasil monitoring dan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	2. Membuat Rencana Aksi yang menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan.	evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti. 2. Kecamatan Tapin Utara telah Menyusun rencana aksi untuk setiap indikator kinerja yang diperjanjikan seperti : Kegiatan utama, tahap pelaksanaan, target waktu (triwulan/ bulanan), penanggung jawab dan output kegiatan serta mengintegrasikan rencana aksi dengan perjanjian kinerja dan anggaran (DPA). Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala (bulanan/ triwulan) dan menggunakan rencana aksi sebagai dasar pelaporan kinerja. Kemudian melakukan penginputan rencana aksi melalui website : https://new-sakip.bappelitbang.tapinkab.go.id/ dimana memuat cascading, perencanaan, indikator kinerja, rencana aksi, perjanjian kinerja, evaluasi dan laporan kinerja.
2	Pengukuran Kinerja : 1. Membuat data capaian kinerja dari level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja 2. Meningkatkan kualitas pengukuran dan memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja untuk dijamin penentuan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja	Pengukuran Kinerja : 1. Kecamatan Tapin Utara telah menyusun mekanisme pengumpulan data capaian kinerja secara berjenjang dari level staf, kasubag/kasi, sekretaris hingga camat sesuai target pada perjanjian kinerja (PK) (bulanan/triwulan) dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh sekretaris kecamatan kemudian dilanjutkan penginputan melalui website : https://new-sakip.bappelitbang.tapinkab.go.id/ 2. Kecamatan Tapin Utara melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara rutin (bulanan/triwulan) diantaranya melakukan review indikator kinerja agar spesifik, terukur relevan dan berbasis hasil (<i>outcome</i>), mempunyai pedoman teknis pengukuran kinerja (definisi operasional, sumber data dan metode perhitungan). Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bahan laporan kinerja (LKjIP).

Sumber : Laporan Hasil Tindak Lanjut atas LHE AKIP Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Berikut realisasi kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Score)	-	72,95	73,20	80,00	80,75	100,94

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022-2025

Uraian penjelasan tabel :

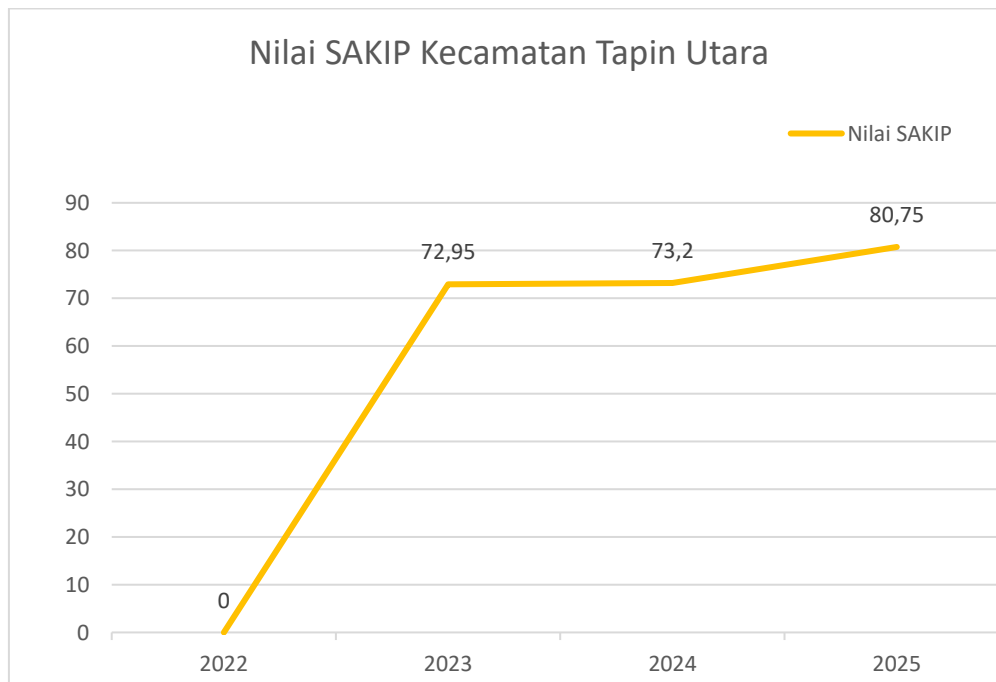
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat terukur realisasinya mulai tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi nilai SAKIP Kecamatan Tapin Utara tercatat sebesar 71,95 dengan predikat sangat baik. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan nilai SAKIP menjadi 73,20 dengan predikat sangat baik, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sehingga pada tahun 2025 Kecamatan Tapin Utara memperoleh Nilai SAKIP yang meningkat jauh dari 2 (tahun) sebelumnya yaitu sebesar 80,75 dengan predikat memuaskan (A) dari target 80,00 dan capaian 100,94 persen.

Dan di 3 (tiga) tahun terakhir nilai sakip Kecamatan Tapin Utara mengalami peningkatan dan melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, Keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP kecamatan Tapin Utara telah mencapai target yang ditetapkan adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk perencanaan yang matang, penganggaran yang efisien, dan pelaporan kinerja yang akurat. Hal ini juga dipengaruhi oleh kolaborasi antara berbagai pihak di tingkat kecamatan, serta komitmen dan dukungan dari

pimpinan dan seluruh perangkat Kecamatan Tapin Utara. Adapun capaian tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Diagram 3.5

Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2022 – 2025



Sumber Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022-2025

Dengan adanya tren positif ini, diharapkan pada tahun berikutnya capaian nilai SAKIP dapat memenuhi ataupun melampaui target yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang dalam diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.27 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Score)	80,75	81.15	99,51

Sumber : Kemajuan Capaian Kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

Menurut tabel di atas Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi Kinerja tahun 2025 adalah 80,75 Score dengan target Akhir Rencana Strategis berada di 81,15 Score. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis mencapai 99,51 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja telah berjalan secara optimal, meskipun masih terdapat selisih sebesar 0,40 poin dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP.

Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan, khususnya dalam penyempurnaan rencana aksi yang lebih terukur, penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta optimalisasi evaluasi internal

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Tapin diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Kecamatan Lainnya		% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Score)	80.75	Tapin Utara	80	100,94
			80.75	Tapin Selatan	80	100,94
			80.75	Binuang	86	93,90

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan dan Binuang Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data tahun 2025, capaian kinerja pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui indikator nilai SAKIP perangkat daerah, menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat peluang untuk perbaikan.

Nilai yang di dapat masing – masing Kecamatan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025. Untuk Kecamatan Tapin Utara mendapatkan nilai 80,75 Score dari target 80,00 poin dengan persentase capaian 100,94 persen, sama dengan Kecamatan Tapin Selatan mendapatkan nilai 80,75 Score dengan persentase capaian 100,94 persen dan untuk Kecamatan Binuang mendapatkan nilai 80,75 Poin dengan persentase capaian kinerja hanya 93,90 persen. Nilai indikator SAKIP Perangkat Daerah dihitung berdasarkan integrasi dari beberapa dokumen, dengan bobot tertentu dengan membandingkan kinerja perangkat daerah antar kecamatan, dapat diidentifikasi kecamatan yang memiliki kinerja baik dan yang perlu ditingkatkan dan mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di

masing-masing kecamatan, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan, Dengan kata lain, membandingkan capaian indikator kinerja SAKIP Perangkat Daerah dengan kecamatan lain adalah bagian dari proses manajemen kinerja yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui indikator nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan capaian predikat memuaskan (A). Dari target yang ditetapkan sebesar 80,00 score, realisasi yang dicapai adalah sebesar 80,75 score, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,94 persen.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar target kinerja telah terlaksana dengan baik. Faktor pendukung yang berkontribusi terhadap capaian ini antara lain adanya koordinasi yang baik antarpegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, serta dukungan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan SAKIP yang membantu meningkatkan pemahaman aparatur.

Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja, yaitu terbatasnya pemahaman sebagian pegawai terhadap konsep SAKIP yang berorientasi hasil, serta keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam proses perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kualitas perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan analisis penyebab, dapat diketahui bahwa meskipun kinerja akuntabilitas perangkat daerah telah berjalan dengan baik, juga masih diperlukan penguatan terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta optimalisasi proses perencanaan dan evaluasi kinerja agar lebih berorientasi pada

hasil. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman aparatur terhadap konsep SAKIP melalui pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan secara lebih intensif dan merata. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penataan beban kerja, serta penyusunan rencana aksi yang lebih terukur dan selaras dengan target kinerja. Koordinasi antarpegawai juga perlu terus ditingkatkan agar tercipta keselarasan dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Tapin Utara dalam penerapan SAKIP dapat semakin optimal dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.29 Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Satuan : Score)	27,00	24,60	91,11	Belum Optimal	Mencerminkan sejauh mana perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja telah dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis SAKIP secara berkala agar pemahaman dan penerapannya dapat lebih merata
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) (Satuan : Score)	20,00	24,60	123,00	Berhasil		
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) (Satuan : Score)	12,00	12,30	102,50	Berhasil		
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja) (Satuan : Score)	21,00	19,25	91,67	Belum Optimal		
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Proporsi jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti secara memadai dibandingkan dengan total temuan yang direkomendasikan untuk diperbaiki	Meningkatkan koordinasi, pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta mendorong komitmen terkait agar penyelesaian rekomendasi dapat dilakukan secara tepat

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								waktu dan sesuai ketentuan
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bapelitbang (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara nyata dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, maupun dokumen pendukung lainnya, dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan	Melakukan penyusunan matriks atas rekomendasi agar semua dapat ditindaklanjuti
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Menggambarkan proporsi jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara memadai dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan oleh evaluator, baik dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja.	Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi LHE AKIP yang jelas dan terukur
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Camat/Sekretaris/Kasi/Kasubag belum menyampaikan data capaian kinerja dan realisasi anggaran secara lengkap dan tepat waktu, sehingga proses Monev tidak optimal.	Menetapkan format dan template standar pengumpulan data kinerja dan anggaran, memberikan panduan pengisian data yang jelas dan memastikan seluruh menyerahkan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								data sesuai jadwal yang ditetapkan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standarpenatausahaan keuangan (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Proporsi surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan total SPJ yang diajukan	Penetapan batas waktu penyampaian SPJ yang jelas dan tertulis
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Laporan keuangan yang disusun secara lengkap, akurat, dan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, serta memenuhi prinsip dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pelatihan terkait SAP, penyempurnaan dan penerapan prosedur penyusunan laporan keuangan secara konsisten, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi sistem keuangan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan
		Persentase aset daerah yang tercatat sesuai	100	100	100	Berhasil	Aset daerah yang telah dicatat secara lengkap, akurat, dan konsisten antara dokumen	Melakukan rekonsiliasi data aset dan keuangan secara

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dengan realisasi fisik dan keuangan (Satuan : Persen)					penatausahaan, laporan keuangan, dan hasil inventarisasi fisik dibandingkan dengan total aset yang dimiliki	rutin (bulanan/triwulan)

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Kecamatan Tapin Utara telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Meskipun sebagian besar indikator telah mencapai target, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tindak lanjut yang lebih efektif melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program/kegiatan agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

Gambar 3.13 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan



Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2025

Gambar 3.14 Asistensi Pengutan Implementasi SAKIP Perangkat Daerah



Sumber : Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

3.1.6 Sasaran 6 : Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.30 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah diukur berdasarkan berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

Sumber : Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang sesuai dengan standar profesionalitas yang ditetapkan diukur berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN, Lebih rinci tujuan memilih sasaran peningkatan profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan IP-ASN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM ASN

Memastikan ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan mendorong pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja ASN

Mengukur tingkat profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan.

3. Mendukung Reformasi Birokrasi

Menjadi instrumen dalam penilaian reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pemerintahan dan mendorong ASN untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan tuntutan pelayanan publik.

4. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik

Profesionalisme ASN berkontribusi langsung terhadap kualitas layanan kepada Masyarakat dan memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar etika dan teknis profesi.

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) menjadi alat ukur yang penting dalam memastikan bahwa ASN di perangkat daerah memiliki standar profesionalitas yang tinggi dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Capaian Indikator Kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Utara dengan capaian sebesar 99,63 persen dari nilai realisasi sebesar 79,70 poin dari 80,00 poin yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah diharapkan untuk tahun mendatang agar dapat dilakukan peningkatan melalui berbagai aspek yaitu perhitungan bobot baik pada Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja serta Dimensi Disiplin. Pengukuran nilai IP-ASN menggunakan sumber data yang berasal dari MyASN namun belum terkoneksi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga keakuratan data IP-ASN dilakukan dengan perekapan secara manual serta perhitungan hanya dilakukan terhadap ASN yang berstatus sebagai PNS. Sehingga ASN dapat memantau nilai indeks profesionalisme secara cepat dan akurat serta dapat mendukung transformasi percepatan layanan kepegawaian serta satu data ASN.

Berikut realisasi kinerja Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Profesionalism e ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Satuan : Poin)	-	32,60	76,14	80	79.7	99,63

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022-2025

Uraian penjelasan tabel :

Menggambarkan Capaian kinerja pada sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah diukur melalui indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat profesionalitas aparatur yang dilihat dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

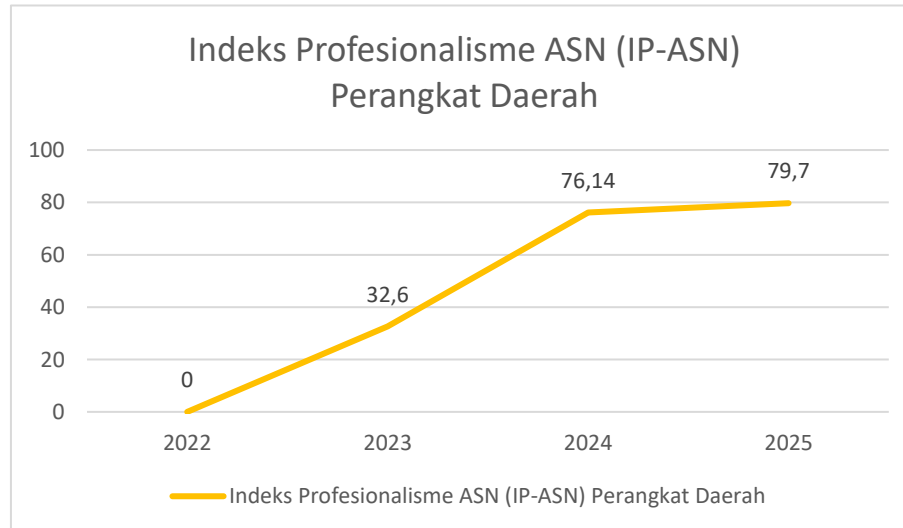
Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IP-ASN Kecamatan Tapin Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Tahun 2022, capaian IP-ASN belum terukur atau tercatat, yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengukuran dan ketersediaan data pendukung. Selanjutnya pada tahun 2023, capaian mulai menunjukkan hasil dengan nilai sebesar 32,60 poin, yang mengindikasikan bahwa upaya awal dalam

pengelolaan dan pengukuran profesionalisme ASN telah mulai dilaksanakan, meskipun masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2024, capaian IP-ASN meningkat sangat signifikan menjadi 76,14 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kinerja ASN, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta mulai tertatanya administrasi dan data kepegawaian secara lebih baik. Adapun pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80 poin, dan realisasinya hanya mencapai 79,70 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 99,63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam peningkatan profesionalisme ASN belum melampaui target yang ditetapkan dan perlu adanya dilakukan evaluasi. Adapun capaian tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.6

Capaian Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah
Tahun 2022 – 2025



Sumber Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2022 – 2025

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.32 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Satuan : Poin)	79.7	81.15	98,21

Sumber : Kemajuan Capaian Kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra 2025-2029

Uraian penjelasan tabel :

Menurut tabel di atas Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah diukur melalui indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat profesionalitas ASN yang meliputi aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator IP-ASN mencapai 79,70 poin, sementara target akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) ditetapkan sebesar 81,15 poin. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian sasaran strategis mencapai 98,21 persen.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme ASN telah dilaksanakan secara optimal dan efektif. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penerapan manajemen kinerja, penegakan disiplin pegawai, serta perbaikan kualitas data dan sistem informasi kepegawaian. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala juga berkontribusi dalam memastikan pencapaian target yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa sasaran strategis meningkatkan profesionalisme ASN telah berada pada kategori sangat baik, dan ke depan perlu diiringi dengan upaya

menjaga konsistensi serta peningkatan kualitas kinerja ASN secara berkelanjutan.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Tapin diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.33 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Kecamatan Lainnya		% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Satuan : Poin)	79.7	Tapin Utara	80	99,63
			71.18	Tapin Selatan	80	88,98
			80.36	Binuang	80	100,45

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan dan Binuang Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Pada pada sasaran meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah, yang diukur melalui indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah, pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Kecamatan Tapin Utara menetapkan target sebesar 80 poin, namun realisasi yang bisa dicapai 79,7 poin, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,63 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa profesionalisme ASN di Kecamatan Tapin Utara belum memenuhi target, namun bisa dilihat capaian yang hampir 100 persen menandakan kualitas SDM aparatur yang tinggi dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain, Tapin Selatan memiliki target 80 poin dengan realisasi 71,18 poin dengan capaian 88,98 persen, sedangkan Kecamatan Binuang memiliki target 80 poin dengan realisasi 80,36 poin dengan capaian sebesar 100,45 persen. Dengan demikian, Kecamatan Tapin Utara menempati posisi kedua diantara Kecamatan lainnya dalam capaian profesionalisme ASN.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Kinerja Kecamatan Tapin Utara pada Sasaran meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah yang diukur melalui indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) menunjukkan capaian kinerja yang baik. Dengan target sebesar 80 poin, realisasi yang dicapai adalah 79,70 poin atau sebesar 99,63 Persen. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Penilaian IP-ASN dilakukan melalui pembobotan pada empat dimensi utama, yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Peningkatan pada dimensi kualifikasi ditunjukkan melalui bertambahnya ASN yang mengikuti pendidikan formal dengan mekanisme izin belajar. Pada dimensi kompetensi, peningkatan didorong oleh keikutsertaan ASN dalam berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, kaji tiru, serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Sementara itu, dimensi kinerja dan disiplin menunjukkan perbaikan melalui penerapan penilaian kinerja yang lebih terukur serta meningkatnya kepatuhan ASN terhadap ketentuan yang berlaku.

Meskipun capaian indikator hampir mencapai target, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait belum optimalnya pengawasan dan evaluasi capaian IP-ASN secara berkala. Monitoring yang belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan menyebabkan perkembangan kinerja ASN belum sepenuhnya terpantau secara komprehensif. Hal ini berpotensi

menimbulkan kesenjangan capaian antar individu maupun unit kerja apabila tidak segera diantisipasi.

Berikut upaya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.34 Upaya Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Menggambarkan proporsi ASN yang mampu menunjukkan kinerja sangat baik, baik dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, maupun perilaku kerja. Semakin tinggi persentase ASN yang mencapai nilai di atas 90%, maka semakin baik pula tingkat produktivitas dan efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Melakukan penguatan pembinaan, peningkatan kompetensi, serta monitoring dan evaluasi kinerja ASN secara berkelanjutan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	70	100	Berhasil	Persepsi penerima layanan terhadap aspek-aspek pelayanan seperti kecepatan, ketepatan, kemudahan prosedur, kejelasan informasi, sikap petugas, serta sarana dan prasarana pendukung	Meningkatkan koordinasi, penataan proses kerja, serta optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan Sekretariat yang lebih efektif
6.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2	2	100	Berhasil	Menilai tingkat keberhasilan aparat sipil negara dalam mengikuti dan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan serta dukungan pimpinan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(Satuan : Persen)					menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi.	dalam penguatan fungsi administrasi
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada aparatur sipil negara. Indikator ini menggambarkan proporsi ASN yang memperoleh layanan secara tepat waktu, akurat, transparan, dan sesuai dengan standar operasional prosedur, meliputi pengelolaan data kepegawaian, kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, cuti, serta layanan administratif lainnya	Melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepegawaian secara berkala
6.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Satuan : Persen)	80	80	100	Berhasil	Menggambarkan proporsi BMD yang berada dalam kondisi baik dan siap digunakan dibandingkan dengan	Melakukan pemutakhiran Kartu Inventaris Barang (KIB) tepat waktu

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status (Berhasil/ Belum Optimal)	Uraian Penjelasan	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							total keseluruhan aset yang dimiliki, baik berupa tanah, bangunan, peralatan, maupun aset lainnya	
6.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Satuan : Persen)	80	80	100	Berhasil	Menggambarkan proporsi BMD yang berada dalam kondisi baik dan siap digunakan dibandingkan dengan total keseluruhan aset yang dimiliki, baik berupa tanah, bangunan, peralatan, maupun aset lainnya	Pembaruan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan kartu pemeliharaan
6.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Satuan : Persen)	100	100	100	Berhasil	Proporsi ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian secara tepat waktu, akurat, transparan, dan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi	Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan segera, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai

Sumber : Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Kecamatan Tapin Tengah telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan :

Gambar 3.15 Pelaksanaan Peningkatan Displin Apel
di Kecamatan Tapin Utara



Sumber : Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.35 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 - 4	(7) = 6/3*100
1	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	<u>7.366.669.932,00</u>	<u>7.090.259.134,00</u>	<u>96,25</u>	276.410.798,00	3,75
1)	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	24.162.000,00	23.717.800,00	98,16	444.200,00	1,84
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.855.500,00	1.806.000,00	97,33	49.500,00	2,67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.855.500,00	1.806.000,00	97,33	49.500,00	2,67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.855.500,00	1.806.000,00	97,33	49.500,00	2,67
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.855.500,00	1.806.000,00	97,33	49.500,00	2,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.740.000,00	16.493.800,00	98,53	246.200,00	1,47
2)	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.971.471.800,00	5.237.947.655,00	87,72	733.524.145,00	12,28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.967.871.800,00	5.234.396.855,00	87,71	733.474.945,00	12,29
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.800.000,00	1.790.400,00	99,47	9.600,00	0,53

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 - 4	(7) = 6/3*100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000,00	1.760.400,00	97,80	39.600,00	2,20
3)	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.320.400,00</i>	<i>88,80</i>	<i>179.600,00</i>	<i>11,97</i>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	1.320.000,00	88,80	179.600,00	12,00
4)	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>460.093.000,00</i>	<i>436.995.884,00</i>	<i>94,98</i>	<i>23.097.116,00</i>	<i>5,02</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.332.800,00	4.220.000,00	97,40	112.800,00	2,60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.448.100,00	54.788.730,00	90,64	5.659.370,00	9,36
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.178.700,00	61.620.650,00	86,57	9.558.050,00	13,43
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.344.000,00	16.415.000,00	89,48	1.929.000,00	10,52
	Penyediaan Bahan Material	6.107.400,00	5.894.000,00	96,51	213.400,00	3,49
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.882.000,00	289.257.504,00	98,09	5.624.496,00	1,91
5)	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>201.977.800,00</i>	<i>193.752.500,00</i>	<i>95,93</i>	<i>8.225.300,00</i>	<i>4,07</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.867.800,00	174.438.500,00	95,91	7.429.300,00	4,09
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.110.000,00	19.314.000,00	96,04	796.000,00	3,96

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 - 4	(7) = 6/3*100
6)	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	247.557.600,00	225.900.660,00	91,25	21.656.940,00	8,75
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.199.400,00	8.152.000,00	99,42	47.400,00	0,58
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.901.000,00	46.641.460,00	69,72	20.259.540,00	30,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.457.200,00	171.107.200,00	99,22	1.350.000,00	0,78
7)	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	212.532.010,00	200.391.620,00	94,29	12.140.390,00	5,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.398.200,00	45.395.620,00	80,49	11.002.580,00	19,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.133.810,00	7.960.000,00	97,86	173.810,00	2,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.000.000,00	147.036.000,00	99,35	964.000,00	0,65
2	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>98,36</u>	400.000,00	1,64
1)	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	24.400.000,00	24.000.000,00	98,36	400.000,00	1,64
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.400.000,00	24.000.000,00	98,36	400.000,00	1,64
3	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</u>	<u>2.991.197.600,00</u>	<u>2.920.136.950,00</u>	<u>97,62</u>	71.060.650,00	2,38

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 - 4	(7) = 6/3*100
1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.156.100,00	61.426.000,00	97,26	1.729.500,00	2,74
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.599.000,00	3.500.000,00	97,25	99.000,00	2,75
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.557.100,00	57.926.600,00	97,26	1.630.500,00	2,74
2)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.920.655.500,00	2.851.596.350,00	97,63	69.059.150,00	2,36
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.466.000,00	2.400.000,00	97,32	66.000,00	2,68
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1.306.335.956,00	1.304.200.000,00	99,84	2.135.956,00	0,16
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.611.853.544,00	1.544.996.350,00	95,85	66.857.194,00	4,15
3)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.386.000,00	7.114.000,00	96,32	272.000,00	3,68
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.920.000,00	4.740.000,00	96,34	180.000,00	3,66
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.466.000,00	2.374.000,00	96,27	92.000,00	3,73
4	<u>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</u>	<u>2.466.000,00</u>	<u>2.376.000,00</u>	<u>96,35</u>	90.000,00	3,65
1)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.466.000,00	2.376.000,00	96,35	90.000,00	3,65
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	2.466.000,00	2.376.000,00	96,35	90.000,00	3,65

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 - 4	(7) = 6/3*100
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
5	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</u>	<u>4.822.750,00</u>	<u>4.690.000,00</u>	<u>97,25</u>	132.750,00	2,75
1)	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	4.822.750,00	4.690.000,00	97,25	132.750,00	2,75
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.822.750,00	4.690.000,00	97,25	132.750,00	2,75
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>65.000.000,00</u>	<u>58.776.000,00</u>	<u>90,42</u>	6.224.000,00	9,58
1)	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	65.000.000,00	58.776.000,00	90,42	6.224.000,00	9,58
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	150.000,00	3,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	150.000,00	3,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 - 4	(7) = 6/3*100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	150.000,00	3,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	4.640.000,00	92,80	360.000,00	7,20
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.000.000,00	4.640.000,00	92,80	360.000,00	7,20
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.000.000,00	4.638.000,00	92,76	362.000,00	7,24
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	35.000.000,00	30.308.000,00	86,59	4.692.000,00	13,41
	J U M L A H	10.207.180.560,00	9.329.991.069,00	91,41	877.189.491,00	8,59

Sumber : SIPD RI dan SIPANDA Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel:

Seperti yang terlihat pada tabel di atas realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 9.329.991.069,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 10.207.180.560,00 atau sebesar 91,41 persen capaian realisasi menunjukkan adanya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Tapin Utara yang dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan rencana tahunan yang telah dibuat. Sehingga target capaian dapat dipenuhi sesuai target yang dijanjikan pada Perjanjian Kinerja. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 877.189.491,00 atau sekitar 8,59 persen dari pagu anggaran. Sisa anggaran tersebut mencerminkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dimana pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan secara efektif tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan tabel di atas bisa dijabarkan bahwa efisiensi per masing – masing Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 7.090.259.134,00 dengan capaian 96.25 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.366.669.932,00 dengan tingkat efisiensi mencapai 3.75 persen. Efisiensi terutama berasal dari :

- Penghematan pada belanja operasional.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah tersedia sehingga tidak diperlukan tambahan pembiayaan yang bersifat tidak prioritas.

Meskipun terdapat penghematan anggaran, seluruh fungsi administrasi dan pelayanan perkantoran tetap dapat berjalan dengan baik sehingga mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 24.000.000,00 dengan capaian 98,36 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.400.000,00 dengan tingkat efisiensi mencapai 1,64 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya pengendalian belanja yang cukup baik serta perencanaan yang relatif sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Efisiensi terjadi karena adanya penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan serta pengurangan biaya operasional yang tidak berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan layanan kepada masyarakat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Realisasi anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 2.920.136.950,00 dengan capaian 97,62 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.2.991.197.600,00 dengan tingkat efisiensi mencapai 2,38 persen.

Efisiensi diperoleh dari:

- Penyesuaian kebutuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi riil di lapangan.
- Penghematan biaya pelaksanaan kegiatan musyawarah, pembinaan, dan fasilitasi masyarakat.
- Efisiensi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan melalui pengendalian biaya serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Penghematan tersebut tidak mengurangi manfaat program yang diterima masyarakat karena seluruh kegiatan utama tetap dapat dilaksanakan sesuai target.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Realisasi anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 2.376.000,00 dengan capaian 96,35 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.2.466.000,00 dengan tingkat efisiensi mencapai 3.65 persen. Hal ini

menunjukkan adanya efisiensi, yaitu terdapat penghematan dalam penggunaan anggaran tanpa mengganggu pelaksanaan program. Dengan kata lain, kegiatan dalam program tersebut hampir seluruhnya terlaksana sesuai rencana, namun masih mampu menghemat sebagian dana, sehingga penggunaan anggaran dapat dikatakan efektif dan efisien. Efisiensi terjadi melalui pelaksanaan koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait, pemanfaatan forum koordinasi yang telah tersedia, serta penghematan biaya operasional kegiatan tanpa mengurangi intensitas koordinasi dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 4.822.750,00 dengan realisasi anggaran Rp.4.690.000,00 dengan capaian 97,25 persen dengan tingkat efisiensi mencapai 2,75 persen. Yang berarti terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai, namun program tetap dapat dilaksanakan. Hal ini mencerminkan penggunaan anggaran yang hemat, tepat, dan tidak boros. Program telah terlaksana sesuai rencana. Tingginya persentase ini menandakan bahwa target program dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat dikatakan optimal. Efisiensi diperoleh dari pengendalian biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan serta optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung kegiatan yang telah tersedia. Dengan demikian target program tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Anggaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 65.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.58.776.000,00 dengan capaian 90,42 persen sisa Anggaran Rp.6.224.00,00 dengan tingkat efisiensi mencapai 2,75 persen.

Hal ini mencerminkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan aktual.

Efisiensi pada program ini terutama berasal dari:

- Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pembinaan desa dengan kebutuhan dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
- Menghemat biaya untuk koordinasi dan pendampingan desa.
- Menggunakan sumber daya aparatur kecamatan secara optimal untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Secara umum, penggunaan anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.329.991.069,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 10.207.180.560,00 atau sebesar 91,41 persen capaian realisasi. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil sehingga anggaran digunakan secara lebih efektif.
3. Adanya penghematan pada beberapa komponen belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai rencana.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100 persen. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta penghematan pada pelaksanaan kegiatan tertentu. Kondisi tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya sasaran kinerja organisasi dengan tingkat penyerapan anggaran yang terkendali, sehingga menghasilkan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tapin Utara Tahun ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tapin Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tapin Utara memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 2 (dua) sasaran strategis tercapai dan 4 (empat) sasaran strategis tidak tercapai/belum optimal.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Tapin Utara adalah :
 - Dalam pelaksanaan pengumpulan data survei kepuasan masyarakat disebabkan oleh rendahnya partisipasi responden dalam pengisian kuesioner, dimana sebagian responden enggan meluangkan waktu setelah menerima layanan, terutama dalam kondisi terburu-buru untuk melanjutkan aktivitas lain. Terdapat persepsi bahwa proses pengisian kuesioner memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dianggap tidak praktis dan sebagian responden juga merasa bahwa penilaian

yang mereka berikan tidak akan memberikan dampak atau perubahan secara langsung terhadap kualitas pelayanan, sehingga motivasi untuk berpartisipasi menjadi rendah.

- Masih terbatasnya pemahaman sebagian pegawai terhadap konsep SAKIP yang berorientasi hasil (*outcome-based*). Selama ini, sebagian pegawai cenderung masih berfokus pada penyusunan laporan berbasis kegiatan (*output*) dibandingkan pada hasil dan dampak kinerja (*outcome*).

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Tapin Utara adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi langkah perbaikan dengan menyederhanakan instrumen kuesioner agar lebih singkat, jelas, dan mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk diisi dan meningkatkan pendekatan persuasif dari petugas layanan, dengan memberikan penjelasan singkat mengenai pentingnya survei serta mendorong responden untuk berpartisipasi sebelum meninggalkan lokasi pelayanan. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan umpan balik hasil survei, seperti menampilkan hasil atau tindak lanjut dari survei secara terbuka.
2. Rekomendasi langkah perbaikan dengan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait implementasi SAKIP yang berorientasi hasil, sehingga seluruh pegawai memiliki persepsi dan kemampuan yang sama dalam menyusun perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, perlu dilakukan penguatan manajemen sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang lebih proporsional serta penunjukan tim khusus pengelola SAKIP agar beban kerja tidak terpusat pada individu tertentu.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Tapin Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Kartau, 31 Maret 2026
Camat Tapin Utara



IVADA CHANDRA SARI, S.STP, M.M
NIP. 198602062004122001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radu Chandra Sari, S.STP., M.M
Jabatan : Camat Tapin Utara Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. Yarnani, S.Ak, MM
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengontrol tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Mei 2025


Pihak Kedua,

H. Yarnani, S.Ak, MM


Pihak Pertama,

Radu Chandra Sari, S.STP., M.M
NIP. 1985056 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TAPIN UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	82,50 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai Ketentuan Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset yang sesuai Ketentuan Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100 % 100 % 100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 Poin

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 7.022.790.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 40.000.000
3	Program Pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.810.170.000
4	Program Koordinasi Kemitraan dan Kemitraan Umum	Rp. 2.496.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 9.645.500
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 85.000.000

Rantau, 03 Mei 2025


Pihak Kedua,

H. Yarnani, S.Ak, MM


Pihak Pertama,

Radu Chandra Sari, S.STP., M.M
NIP. 1985056 200412 2 001

Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



No.	Program	Anggaran
1	Program Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.116.294.210
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 34.400.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.561.107.800
4	Program Koordinasi Ketenagamaan dan Ketenfikan Umum	Rp. 2.466.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.922.750
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 65.000.000

Bantau, 05 Oktober 2023

Pihak Ketua:


BUKTI TAPIN
H. Yandriyasa, MM

Pihak Petugas:

CAMAT TAPIN UTARA
RASUPATEN TAPIN


Idris Chandra Sari, S.STP, M.M
NIP. 19860206 200412 2 001

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

matriks Renstra Kecamatan Tapin Utara selama 5 tahun

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan	91,46 Poin	92,55 Poin		92,60 Poin		92,65 Poin		92,70 Poin		92,75 Poin	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,20 Score	80,05 Score		80,10 Score		80,15 Score		80,20 Score		80,25 Score	
	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	76,14 Poin	80,05 Poin		80,10 Poin		80,15 Poin		80,20 Poin		80,25 Poin	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	22,20 Score	27,00 Score	7.099.304.506	27,00 Score	7.412.572.574	27,00 Score	7.761.887.539	27,00 Score	8.128.420.692	27,00 Score	8.513.046.382
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,70 Score	20,05 Score		20,10 Score		20,15 Score		20,20 Score		20,25 Score	
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	10,80 Score	12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score	
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	16,50 Score	21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score	
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	70 Poin	70 Poin		70 Poin		70 Poin		70 Poin		70 Poin	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bapelitbang	100%	100%	24.160.000	100%	30.160.000	100%	36.160.000	100%	42.160.000	100%	102.160.000
	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang tindak lanjut	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3 Dokumen	5.022.000	3 Dokumen	6.022.000	3 Dokumen	7.022.000	3 Dokumen	8.022.000	3 Dokumen	18.022.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7 Laporan	11.718.000	7 Laporan	12.718.000	7 Laporan	13.718.000	7 Laporan	14.718.000	7 Laporan	24.718.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	5.925.591.096	100%	6.157.859.164	100%	6.426.174.129	100%	6.711.707.282	100%	6.686.332.972
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang / Bulan	714 Orang / Bulan	5.921.991.096	714 Orang / Bulan	6.152.259.164	714 Orang / Bulan	6.418.574.129	714 Orang / Bulan	6.702.107.282	714 Orang / Bulan	6.656.732.972
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	14.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	14.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%	80%	12.000.000	80%	15.000.000	80%	18.000.000	80%	21.000.000	80%	51.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	16.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	19.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	16.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2%	2%	477.062.800	2%	534.062.800	2%	591.062.800	2%	648.062.800	2%	818.062.800
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.332.800	12 Paket	5.332.800	12 Paket	6.332.800	12 Paket	7.332.800	12 Paket	17.332.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.448.100	12 Paket	61.448.100	12 Paket	62.448.100	12 Paket	63.448.100	12 Paket	73.448.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	12 Paket	5.000.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	18.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	52.163.700	12 Paket	53.163.700	12 Paket	54.163.700	12 Paket	55.163.700	12 Paket	65.163.700

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.046.800	12 Paket	17.046.800	12 Paket	18.046.800	12 Paket	19.046.800	12 Paket	29.046.800
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.107.400	12 Paket	7.107.400	12 Paket	8.107.400	12 Paket	9.107.400	12 Paket	19.107.400
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4.800.000	12 Laporan	5.800.000	12 Laporan	6.800.000	12 Laporan	7.800.000	12 Laporan	17.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	328.164.000	12 Laporan	378.164.000	12 Laporan	428.164.000	12 Laporan	478.164.000	12 Laporan	578.164.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%	80%	163.897.800	80%	168.897.800	80%	173.897.800	80%	178.897.800	80%	228.897.800
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Unit	10.000.000	5 Unit	11.000.000	5 Unit	12.000.000	5 Unit	13.000.000	5 Unit	23.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	10 Unit	123.587.800	10 Unit	124.587.800	10 Unit	125.587.800	10 Unit	126.587.800	10 Unit	136.587.800
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	23.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit	5 Unit	10.310.000	5 Unit	11.310.000	5 Unit	12.310.000	5 Unit	13.310.000	5 Unit	23.310.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	23.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%	252.760.800	100%	255.760.800	100%	258.760.800	100%	261.760.800	100%	291.760.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.199.400	12 Laporan	9.199.400	12 Laporan	10.199.400	12 Laporan	11.199.400	12 Laporan	21.199.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.901.000	12 Laporan	67.901.000	12 Laporan	68.901.000	12 Laporan	69.901.000	12 Laporan	79.901.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	177.660.400	12 Laporan	178.660.400	12 Laporan	179.660.400	12 Laporan	180.660.400	12 Laporan	190.660.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%	80%	243.832.010	80%	250.832.010	80%	257.832.010	80%	264.832.010	80%	334.832.010

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	52.698.200	1 Unit	53.698.200	1 Unit	54.698.200	1 Unit	55.698.200	1 Unit	65.698.200
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5 Unit	10.000.000	5 Unit	11.000.000	5 Unit	12.000.000	5 Unit	13.000.000	5 Unit	23.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	18 Unit	8.133.810	18 Unit	9.133.810	18 Unit	10.133.810	18 Unit	11.133.810	18 Unit	21.133.810
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	148.000.000	1 Unit	149.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	151.000.000	1 Unit	161.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	23.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	8.000.000	1 Unit	18.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	1 Ha	10.000.000	1 Ha	11.000.000	1 Ha	12.000.000	1 Ha	13.000.000	1 Ha	23.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	91,46 Poin	92,55 Poin	2.893.624.686	92,60 Poin	3.118.127.308	92,65 Poin	3.224.492.374	92,70 Poin	3.335.898.282	92,75 Poin	3.452.601.011
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%	68.614.000	100%	74.614.000	100%	78.614.000	100%	79.503.500	100%	84.503.500
	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa dengan sumber dana APBDes yang sesuai dengan RAB (satuan : persen)	-	80%		80%		80%		80%		80%	
	Persentase rekomendasi administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan Masyarakat (satuan : kegiatan)	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial (satuan : kegiatan)	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.599.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.500.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	63.515.000	1 Laporan	67.515.000	1 Laporan	69.515.000	1 Laporan	70.404.500	1 Laporan	73.404.500
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%	2.813.624.686	100%	3.028.127.308	100%	3.126.492.374	100%	3.233.008.782	100%	3.340.711.511
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di terlaksana	80%	80%		80%		80%		80%		80%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.466.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Rapat Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	1.527.654.222	4 Pokmas/Ormas	1.690.948.141	4 Pokmas/Ormas	1.745.502.571	4 Pokmas/Ormas	1.817.157.014	4 Pokmas/Ormas	1.865.198.086
	Jumlah Kegiatan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	8 Unit	4 Unit	1.281.704.464	4 Unit	1.330.913.167	4 Unit	1.372.723.803	4 Unit	1.405.585.768	4 Unit	1.463.247.425
	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	-	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	-
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	2.800.000	1 Laporan	3.800.000	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan	5.800.000
	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Posyantek yang di Bina (satuan : persen)	-	100%	11.386.000	100%	15.386.000	100%	19.386.000	100%	23.386.000	100%	27.386.000
	Persentase BUMDES yang berbadan hukum (satuan : persen)	-	80%		80%		80%		80%		80%	
	Persentase KOPERASI DESA yang berbadan hukum (satuan : persen)	-	80%		80%		80%		80%		80%	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	1 Kegiatan	-		-		-		-		-
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	1 Kegiatan	-		-		-		-		-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	4.920.000	1 Laporan	5.920.000	1 Laporan	6.920.000	1 Laporan	7.920.000	1 Laporan	8.920.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	2.466.000	1 Laporan	3.466.000	1 Laporan	4.466.000	1 Laporan	5.466.000	1 Laporan	6.466.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	91,46 Poin	92,55 Poin	5.466.000	92,60 Poin	7.466.000	92,65 Poin	9.466.000	92,70 Poin	11.466.000	92,75 Poin	13.466.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti (satuan : persen)	-	100%	5.466.000	100%	7.466.000	100%	9.466.000	100%	11.466.000	100%	13.466.000
	Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.466.000	1 Laporan	4.466.000	1 Laporan	5.466.000	1 Laporan	6.466.000	1 Laporan	7.466.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Rapat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	91,46 Poin	92,55 Poin	12.645.500	92,60 Poin	14.645.500	92,65 Poin	16.645.500	92,70 Poin	18.645.500	92,75 Poin	20.645.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti (satuan : persen)	-	100%	12.645.500	100%	14.645.500	100%	16.645.500	100%	18.645.500	100%	20.645.500

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	60 Orang	5.000.000	60 Orang	5.500.000	60 Orang	6.000.000	60 Orang	6.500.000	60 Orang	7.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	60 Orang	5.000.000	60 Orang	5.500.000	60 Orang	6.000.000	60 Orang	6.500.000	60 Orang	7.000.000
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	1 Dokumen	2.645.500	1 Dokumen	3.645.500	1 Dokumen	4.645.500	1 Dokumen	5.645.500	1 Dokumen	6.645.500
	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91,46 Poin	92,55 Poin	67.000.000	92,60 Poin	70.000.000	92,65 Poin	75.000.000	92,70 Poin	80.000.000	92,75 Poin	85.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Laporan APBDes yang Lengkap dan Serapan Minimal 75% (satuan : persen)	-	100%	67.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000
	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	96 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitas dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitas dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	24 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000

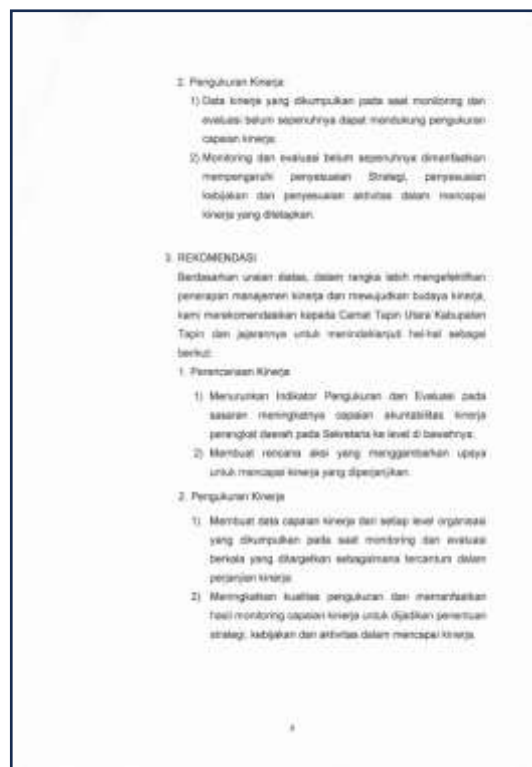
Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Rapat Evaluasi untuk Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Rapat Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	19.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91,46 Poin	92,55 Poin	50.000.000	92,60 Poin	55.000.000	92,65 Poin	60.000.000	92,70 Poin	65.000.000	92,75 Poin	70.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	-	100%	45.000.000	100%	47.500.000	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	47.500.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	55.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Kegiatan Rapat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	-	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	12.500.000	100%	15.000.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	15.000.000
	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
JUMLAH				10.128.040.692		10.677.811.382		11.147.491.413		11.639.430.474		12.154.758.893

Lampiran 4 LHE SAKIP Kecamatan Tapin Utara

LHE SAKIP Kecamatan Tapin Utara yang diterima dari Inspektorat



Produk: P4000 berdaya 100W

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN UTARA
Jl. SPG No. 76 Rantau Kode Pos 71111

Hariini, 18 September 2025

Nomor : 900/421/Kec.Taput2025
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Anggaran 2024

Kepada : Seluruh Karyawan Kecamatan Tapin Utara
Di :
Tempat :

Merindukanjil Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektori Kabupaten Tapin tanggal 18 September Nomor : 706.1.2.1/Evaluasi/SAKIP/Kec.Tapin Utara/Wil. I/INSP/2025 ada rekomendasi yang harus di tindaklanjuti. Sehubungan dengan informasi tersebut maka kami mengundang Seluruh Karyawan untuk dapat berhadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 September 2025
Pukul : 09.00 WITA s.d Selesai
Tempat : Kecamatan Tapin Utara

Demiakan undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

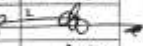
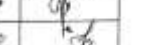
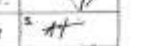
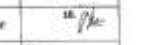
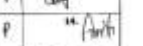
CAMAT TAPIN UTARA,

DADA CHANDRA SARI S.STP, M.M.
Pembina Tk. I (Pvby)
NIP. 13890206 200412 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN UTARA
Jalan SPG No 76 Tapin. (5517) - 51375

DAFTAR HADIR

hari/tanggal : Selasa, 16 September 2025
Waktu : 09.00 '15.00 s.d selesai
Tempat : Kecamatan Tapin Utara
Acara : Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Jabatan	I/P	Tanda Tangan
1.	DADA CHANDRA SARI	CAMAT	P	
2.	BANA ANI	Ms. Stewen	L	
3.	Indigeti	Ms. pembantu	P	
4.	Ms. H. Rizki	Ms. TAPIN	P	
5.	Ami Dina A	Kepala Desa	P	
6.	ALIMAH	Ms. STWIS	L	
7.	Budi Nanda Pindan	Ms. Pembantu	L	
8.	Rahmawati, SPS	Kepala Desa	P	
9.	Pratiwi	STW	L	
10.	Kurnia	STW	P	
11.	Briny Kurniati F	PTT	L	
12.	Ester Ayu Egunah	L	P	
13.	HER RUTHA SILWA	PTT	P	
14.	Eti Aminda	PTT	P	
15.	Dini Nanda Pindan	Ms. Pembantu	P	

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN UTARA
Jl. SPG No. 76 Rantau Kode Pos 71111

NOTULEN

Rapat Hari / Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :

Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Selasa, 18 September 2025
08.00 WITA - Selesai
Kecamatan Tapin Utara

1. Pembukaan Rapat
2. Pembahasan
3. Penutup

Pimpinan Rapat : Camat Tapin Utara
Sekretaris : Ms. Stewen Camat Tapin Utara
Pencatat : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Peserta Rapat : Seluruh Karyawan Karyawan Kecamatan Tapin Utara
Kegiatan :

1. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Camat Tapin Utara

2. Dasar :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3. Tujuan :

- Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

4. Kesimpulan :

- Penanganan Kinerja
 - 1) Akan merumuskan indikator Pengukuran Kinerja dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Semester ke level di bawahnya
 - 2) Akan membuat rencana aksi yang menggambarkan Upaya untuk mencapai kinerja yang diharapkan
- Pengukuran Kinerja
 - 1) Akan membuat data capaian kinerja dari setiap level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang dilaporkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja
 - 2) Akan meningkatkan kualitas pengukuran dan memperlakukan hasil monitoring capaian kinerja untuk dijadikan pemetaan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja

Notulis,

Rahmawati, S.Pd

